

**TRADISI HUTANG DENGAN SISTEM *BOLOGADAI* DI DESA
JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN**

1. Letak Geografis

Secara administratif, Desa Jotosanur terletak di wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-Desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kramat Kecamatan Lamongan. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung. Sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Jatirejo Kecamatan Tikung.

Desa Jotosanur mempunyai luas wilayah 221,70 Ha. Adapun rincian Luas wilayah menurut penggunaan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Luas Wilayah Desa Jotosanur

Kegunaan	Luas (Ha)
Luas Pemukiman	10,50 Ha
Luas Persawahan	190,50 Ha
Luas Perkebunan	0 Ha
Luas Kuburan	1,50 Ha
Luas Pekarangan	4,50 Ha
Luas Taman	0 Ha
Luas Perkantoran	0,20 Ha
Luas Prasarana Umum Lainnya	14,50 Ha
Total Luas	221,70 Ha

Sumber: Arsip Desa Jotosanur tahun 2015

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar luas wilayah Desa Jotosanur digunakan untuk persawahan, yaitu seluas 190,50 Ha.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Jotosanur adalah terdiri dari 968 KK, dengan jumlah total 4.409 jiwa, dengan rincian 2.198 laki-laki dan 2.211 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	138	140	278	6.3 %
2	5-9	182	199	381	8.6 %

3	10-14	168	183	351	8.0 %
4	15-19	153	179	332	7.5 %
5	20-24	168	189	357	8.1 %
6	25-29	156	179	335	7.6 %
7	30-34	147	187	334	7.6 %
8	35-39	139	168	307	7.0 %
9	40-44	135	163	298	6.8 %
10	45-49	121	153	273	6.2 %
11	50-54	116	178	294	6.7 %
12	55-58	96	133	229	5.2 %
13	≥59	479	160	639	14.5 %
Jumlah Total		2.198	2.211	4.409	100 %

Sumber: Arsip Desa Jotosanur tahun 2015

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Jotosanur sekitar 1.904 atau 43,2 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Jotosanur termasuk tinggi. Dari jumlah 968 KK di atas, sejumlah 370 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 335 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 165 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 82 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 16 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 38,2 % KK Desa Jotosanur adalah keluarga miskin.

3. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Jotosanur Rp.50.000

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Jotosanur dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan,

industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.015 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 891 orang, yang bekerja di sektor industri 96 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 323 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.325 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3.3
Mata Pencarian dan Jumlahnya

No	Mata Pencanharian	Jumlah		Jumlah Total	Prosentase
		L	P		
1	Petani	178	206	384	16.5 %
2	Buruh Tani	260	371	631	27.1 %
3	Pedagang	325	246	571	24.6 %
4	Pegawai Negeri	58	46	104	4.5 %
5	Bidan Swasta	-	2	2	0.1 %
6	Perawat swasta	1	3	4	0.2 %
7	TNI	17	1	18	0.8 %
8	POLRI	2	-	2	0.1 %
9	Dukun Bayi	-	1	1	0.0 %
10	Dosen Swasta	4	-	4	0.2 %
11	Arsitektur	2	-	2	0.1 %
12	Sopir	33	-	33	1.4 %
13	Tukang Ojek	12	-	12	0.5 %
14	Tukang Becak	31	-	31	1.3 %
15	Tukang Kayu/batu	107	-	107	4.6 %
16	Karyawan pabrik	78	18	96	4.1 %
17	Sektor lain	172	151	323	13.9 %
Jumlah Total				2.325	100 %

Sumber: Arsip Desa Jotosanur tahun 2015

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa

Jotosanur masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Jotosanur, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Jotosanur baru tersedia di tingkat pendidikan dasar SD sementara untuk pendidikan tingkat pertama dan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Jotosanur yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Jotosanur. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

Penduduk Desa Jotosanur mayoritas menganut agama Islam, hal ini bisa diketahui dengan semakin luasnya pendidikan agama Islam yang didirikan di setiap dusun mulai dari dusun joto, sanur dan pulo. Tidak hanya itu peran tokoh masyarakat di Desa Jotosanur juga sangat penting dalam menyebarkan agama Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Desa Jotosanur beragama Islam, tetapi praktek kehidupan yang terjadi masih dikatakan kurang memahami mengenai ilmu agamanya. Karena masyarakat Desa Jotosanur baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum

yang berlangsung begitu saja tanpa mengetahui bagaimana latar belakang sejarahnya. Sebagian orang mengatakan bahwa transaksi ini telah berlangsung sejak zaman pra kemerdekaan. Transaksi ini marak terjadi sampai pada tahun 1980-an. Namun seiring perkembangan zaman, transaksi ini mulai berkurang, tetapi masih ada yang melaksanakan transaksi ini di masyarakat.⁸⁵

Masyarakat melakukan hutang dengan menjadikan pemanfaatan sawahnya sebagai jaminan kepada orang yang mau menghutangnya, bukan menyerahkan sertifikat tanah seperti yang dikenal masyarakat saat ini ketika melakukan hutang di dunia perbankan. Karena kebanyakan dari mereka membutuhkan uang dengan waktu yang singkat dan dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan salah satu harta yang dimilikinya yaitu sawah. Sedangkan orang yang ada di sekitarnya rata-rata seorang petani, sehingga dengan terpaksa ia menjadikan sawahnya sebagai jaminan atas hutangnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁸

Masyarakat menjadikan pemanfaatan sawah sebagai jaminan hutang, dikarenakan pihak *rāhin* merasa aman dengan tidak menjadikan sertifikat

⁸⁸ H. Asyhari, *Wawancara*, Lamongan, 26 April 2016.

Seiring berjalannya waktu, transaksi ini tidak hanya terjadi antar keluarga saja, melainkan meluas ke masyarakat umum. Selama ada orang yang membutuhkan uang dan mempunyai sawah sebagai jaminan serta ada orang yang mampu memberikan pinjaman, maka saat itu juga transaksi *bologadai* ini terjadi. Karena pada saat orang yang membutuhkan uang, tidak semua keluarganya mempunyai uang untuk menghutangnya. Sehingga beralih kepada orang lain yang mempunyai uang yang mampu untuk menghutangnya dan sepakat dengan pemanfaatan sawah sebagai jaminan penguat hutangnya.⁹⁰

⁹⁰ H. Sulhan, *Wawancara*, Lamongan 25 April 2016

untuk memberikan jaminan ketika menghutangi, melainkan atas kehendak orang yang berhutang sendiri.⁹⁵

Jika kedua belah pihak sudah sepakat, dan orang yang berhutang (*rāhin*) sudah menerima uangnya, maka secara otomatis akad selesai dan transaksi ini sudah berlaku mengikat antara kedua belah pihak. Dengan demikian pemberi hutang (*murtahin*) berhak memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan. Namun, jika transaksi ini terjadi ketika musim tanam, maka pemberi hutang (*murtahin*) baru bisa memanfaatkan *marhūn* setelah orang yang berhutang (*rāhin*) memanen sawah yang telah ditanaminya. Setelah itu *murtahin* berkuasa penuh untuk memanfaatkan dan menikmati hasil sawah yang dijadikan jaminan. Kejadian seperti tersebut tidak disyaratkan pada saat akad, namun terjadi begitu saja mengikuti kebiasaan masyarakat yang selama ini telah berlangsung.⁹⁶

Pada saat akad terjadi, tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu untuk pengembalian hutang. Sehingga orang yang berhutang bisa melunasinya kapanpun sampai ia mampu untuk melunasinya. Hal ini dikarenakan pemilik sawah (*rāhin*) merasa tidak khawatir akan beralihnya hak milik sawah ke tangan pemberi hutang (*murtahin*), sebab sertifikat sawah tidak diberikan kepada *murtahin* sebagai jaminan. Selain itu, *murtahin* juga bisa memanfaatkan sawah yang digunakan sebagai *marhūn*.

⁹⁵ Muslikah, *Wawancara*, 6 Mei 2016.

⁹⁶ Supiyah, *Wawancara*, Lamongan, 5 Mei 2016.

Adapun dampak negatif terhadap orang yang berhutang (*rāhin*) yaitu tidak bisa memanfaatkan sawahnya selama ia belum bisa melunasi hutangnya. Padahal sawah yang dijadikan *marhūn* merupakan sumber mata pencaharian untuk memenuhi keluarganya. Jika sawah tersebut digadaikan maka orang yang berhutang (*rāhin*) harus melakukan pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga untuk melunasi hutangnya pun akan semakin sulit, karena uang yang didapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Sedangkan hutangnya masih tetap utuh, belum bisa terlunasi. Seperti yang terjadi pada ibu zul RT 01 RW04 “*sakjane aku yo ngeroso rugi mbak, wong aku yo mek duwe sawah siji trus pas aku butuh duwit digawe anakku daftar sekolah dadine aku kudu gadekno sawahku ben entuk duwit digawe anakku. Sakmarine iku aku lan bojoku yo melu wong tandur nang sawah ben iso balikno utangku lan iso nyukupi*

Disamping itu tetap dapat berdampak negatif pada *murtahin* jika terjadi kesalahpahaman ahli waris dari orang yang berhutang (*rāhin*) apabila *rāhin* meninggal dunia sebab terlalu lamanya transaksi ini berlangsung. Dalam transaksi *bologadai* ini tidak ada bukti yang tertulis dan saksi yang menyaksikan, sehingga mengakibatkan ahli waris tidak mengetahui transaksi yang dilakukan oleh orang tuanya semasa hidupnya sebab *rāhin* belum sempat menceritakan kepada ahli-ahli warisnya. Oleh karena itu, pihak ahli waris dari *rāhin* akan memanfaatkan kembali sawah yang dijadikan *marhūn* orang tuanya, tanpa memberitahu *murtahin* terlebih dahulu. Sebab sertifikat tanah

Dya Irmu, Wawancana, Samongun, 29 April 2018.